



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

UNIT KERJA : DIVISI PSO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KOKOH FIRSTONO JAMIL
2. Jabatan : VICE PRESIDENT
3. NHK : 1002691

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.328.912.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/90 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 2.135 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 102.480.000
3. Tanah Seluas 2.313 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 148.032.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 963.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 407.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, AJS MOTOR Tahun 1956, WARISAN Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 277.720.752

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.030.132.752

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.030.132.752

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 April 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

UNIT KERJA : DIVISI MANAJEMEN RANTAI PASOK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAJIR
2. Jabatan : VICE PRESIDENT
3. NHK : 1000557

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 122.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 84.448.292

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 660.948.292

III. HUTANG Rp. 684.507.999

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -23.559.707

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Agustus 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

UNIT KERJA : DIVISI MANAJEMEN ASET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RICKO WAHYUDI**
2. Jabatan : **VICE PRESIDENT**
3. NHK : **1031919**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	325.000.000
1. MOBIL, BYD BYD M6 STANDARD Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.397.000.000

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.397.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Mei 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIVISI STRATEGI & MANAJEMEN ANAK USAHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIPTA ERLANGGA
2. Jabatan : VICE PRESIDENT
3. NHK : 984278

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 1.300.000.000		
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.013.700.000
1. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
2. MOBIL, WULING AIR EV Tahun 2022, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 300.000.000		
3. MOTOR, VESPA SPRINT I-GET Tahun 2022, WARISAN Rp. 53.700.000		
4. MOBIL, BYD M6 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	84.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.227.898.560
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.479.431.137
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.155.529.697

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **6.155.529.697**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

UNIT KERJA : DIVISI LAYANAN & OPERASIONAL HC

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUGROHO ADI KRISTIANTO
2. Jabatan : VICE PRESIDENT
3. NHK : 1014353

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 453.700.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MT EXTRA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.700.000
3. MOBIL, HONDA HRV 1.5L SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERTAGIH Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 121.148.310

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.574.848.310

III. HUTANG Rp. 407.274.771

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.167.573.539

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIVISI MANAJEMEN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI RATIH
2. Jabatan : VICE PRESIDENT
3. NHK : 1014618

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.753.762.600
1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI , Rp. 1.753.762.600		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	629.000.000
1. MOBIL, BYD SEAL Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 629.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	135.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.617.762.600
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.617.762.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Agustus 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

UNIT KERJA : DIVISI AKUNTANSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YASSIR ISMAIL
2. Jabatan : VICE PRESIDENT
3. NHK : 854848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 544.000.000

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER - Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 130.473.478

F. HARTA LAINNYA Rp. 988.800.000

Sub Total Rp. 3.378.273.478

III. HUTANG Rp. 196.011.814

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.182.261.664

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.